

ANALISIS KEBIJAKAN PENANGANAN DAMPAK WABAH COVID-19 PADA SEKTOR SOSIAL-EKONOMI DARI PERSPEKTIF STUDI KEAMANAN NASIONAL DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

POLICY ANALYSIS OF THE IMPACT OF THE COVID-19 PANDEMIC ON THE SOCIAL-ECONOMIC SECTOR FROM THE PERSPECTIVE OF NATIONAL SECURITY STUDIES IN YOGYAKARTA SPECIAL REGION PROVINCE

Farah Asmajasmine Intishardewi¹, Puguh Santoso², Agus Adriyanto³

PRODI DAMAI & RESOLUSI KONFLIK
FAKULTAS KEAMANAN NASIONAL
UNIVERSITAS PERTAHANAN

(faraajasmine@gmail.com, puguh28838@yahoo.com, a_adriyanto@yahoo.com)

Abstrak-Mewabahnya pandemi COVID-19 memberikan dampak bagi sosial-perekonomian. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu provinsi yang paling rentan mengalami dampak terberat, sebab kegiatan perekonomian di Yogyakarta sangat ditopang oleh pariwisata dan pendidikan. Respon variatif dalam bentuk kebijakan dikeluarkan oleh Pemerintah DIY seiring dengan bertambahnya jumlah kasus, yang seringkali tidak sinkron dari sisi kesehatan dan sosial-ekonomi, hal ini dapat berdampak lebih jauh mempengaruhi keamanan nasional dan memunculkan konflik apabila terus berlanjut dan masyarakat mencapai titik kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penanganan dampak wabah Covid-19 pada sektor sosial-ekonomi dan menganalisis strategi peningkatan efektivitas pelaksanaan kebijakannya dari perspektif studi keamanan nasional. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif Sedangkan model evaluasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah CIPP Evaluation model (Context, Input, Process, Product). Hasil penelitian menunjukkan Pemerintah Provinsi DIY telah melakukan berbagai upaya dan rencana yang efektif untuk langkah kedepannya. Yang menjadi catatan adalah perlu adanya optimalisasi dalam sosialisasi yang lebih kepada masyarakat baik dari segi aspek kesehatan pencegahan COVID-19 maupun langkah upaya baru menggerakkan roda ekonomi berbasis teknologi.

Kata Kunci: COVID-19, Kebijakan, Konflik, Sosial-Ekonomi, Keamanan Nasional.

Abstract-The outbreak of the COVID-19 pandemic has had a socio-economic impact. Yogyakarta Special Region Province is one of the provinces most vulnerable to experiencing the heaviest impacts, because economic activity in Yogyakarta is supported by tourism and education. Various responses in the form of policies issued by the DIY government along with the increasing number of cases, which are often out of sync in terms of health and socio-economics, this can have a further impact on national security and lead to conflict if it continues and the public reaches a point of difficulty in fulfilling needs daily. This study aims to evaluate the policies of the Yogyakarta Special Region government in handling the impact of the Covid-19 outbreak on the socio-economic sector and to analyze strategies to increase the effectiveness of its policy implementation from the perspective of national security studies. The researcher used a qualitative approach. The evaluation model chosen in this study was the CIPP Evaluation model (Context, Input, Process, Product). The results showed that the DIY Provincial Government had made effective efforts and plans for the future. But for the note is that there is a

need for optimization in socialization to the public both in terms of health aspects to prevent COVID-19 as well as new efforts to move technology-based economic wheels.

Keywords: COVID-19, Policy, Conflict, Social-Economic, National Security.

Pendahuluan

Epidemi merupakan ancaman non-militer nyata seperti dinyatakan dalam Buku Putih Pertahanan Indonesia yang diterbitkan Kementerian Pertahanan RI tahun 2015. Meluasnya penyebaran wabah COVID-19 hingga menjadi pandemi, merupakan ancaman non-militer sebagaimana tertulis ancaman non-militer lain dalam Buku Putih yaitu; bencana alam, perubahan iklim, aksi terorisme, ketahanan pangan, air, dan energi. Indonesia sebetulnya sudah menyadari bahwa keamanan kesehatan (*health security*) seperti terjadinya penyebaran wabah yang luas, merupakan suatu ancaman non-militer nyata yang mempunyai dampak setara (atau lebih buruk) jika dibandingkan dengan ancaman militer (Kemhan, 2015).

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu provinsi yang paling rentan terdampak adanya pandemi COVID-19. Sebab, tak hanya masalah kesehatan, sebagian besar perekonomian masyarakat di Yogyakarta ditunjang dari sektor informal pariwisata dan pendidikan. Adanya pandemi COVID-

19 menyebabkan perekonomian para pelaku usaha kecil yang kerjanya bergantung pada pariwisata dan pendidikan menjadi terganggu atau bahkan kehilangan mata pencaharian.

Badan Pusat Statistik (BPS) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mencatat jumlah pengangguran per Agustus 2020 mencapai 101.805 orang atau sebesar 4,57 persen dari jumlah angkatan kerja sebanyak 2,2 juta orang. Angka ini mengalami peningkatan bila dibandingkan pada periode Februari 2020, jumlah pengangguran mencapai 72.097 orang atau sebesar 3,38 persen. Penduduk bekerja D.I. Yogyakarta sebanyak 2,126 juta orang, berkurang 48 ribu orang dari Agustus 2019. Lapangan pekerjaan yang mengalami penurunan terutama pada Penyediaan akomodasi dan makan minum (1,16 persen poin), Jasa Perusahaan (0,83 persen poin), dan Konstruksi (0,76 persen poin). Terdapat 540,12 ribu orang penduduk D.I. Yogyakarta yang terdampak Covid-19, terdiri dari pengangguran (32,37 ribu orang), bukan angkatan kerja (22,83 ribu orang), sementara tidak kerja (36,57 ribu orang), dan penduduk bekerja yang

mengalami pengurangan jam kerja (448,35 ribu orang).

Respon variatif dalam bentuk kebijakan dikeluarkan oleh Pemerintah DIY seiring dengan bertambahnya jumlah kasus COVID-19, diawali dengan keluarnya Instruksi Gubernur No 2/INSTR/2020 tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Resiko Penularan Infeksi Corona Virus Disease 19 pada 3 Maret 2020, yang berisikan 5 poin instruksi kepada jajaran Bupati/Walikota, jajaran Pemerintahan di Lingkungan Pemda DIY, Dinas Kesehatan, BPBD, RSUD/RSK untuk melakukan upaya kewaspadaan menghadapi resiko penularan virus dengan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Namun di sisi lain, 6 hari pasca dikeluarkan instruksi tersebut, tepat tanggal 9 Maret 2020, Kepala Dinas Pariwisata mengutip pernyataan Gubernur DIY dengan memberikan keterangan bahwa Yogyakarta aman dan siap dikunjungi oleh wisatawan. Keterangan ini lahir berdasar atas klaim data yang dilaporkan oleh Dinas Kesehatan yang menyatakan bahwa pada saat itu belum ada warga maupun wisatawan yang terpapar virus COVID-19, padahal hari itu juga ditemukan pasien pertama yang telah erpapar virus dan mendapat penanganan kesehatan

serta isolasi. Keterangan dari Dinas Pariwisata tersebut kemudian disusul oleh beberapa keputusan Gubernur yaitu Keputusan Gubernur mengenai 24 rumah sakit rujukan yang tersebar di 5 Kabupaten/Kota dan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Gugus Tugas Covid-19 pada tanggal 17 Maret 2020.

Menghadapi permasalahan kesehatan yang ada, di satu sisi, Gubernur menghimbau masyarakat DIY untuk disiplin mematuhi protokol kesehatan dan menghindari kerumunan. Opsi kebijakan ini salah satu hal yang ada dalam mekanisme hukum sebagaimana tercantum dalam UU No 6 Tahun 2018 tentang Karantina Wilayah. Perbedaan Karantina Wilayah dan PSBB adalah terletak pada sisi anggaran untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup penduduk yang berada di suatu wilayah. Pada pasal 5 ayat (1) UU No 6 Tahun 2018 menyebutkan bahwa penerapan selama masa karantina, pemenuhan ebutuhan dasar dan makanan hewan ternak akan menjadi tanggungan Pemerintah Pusat sementara dalam penerapan PSBB Pasal 59 tidak mencantumkan mengenai pemenuhan kebutuhan dasar penduduk. Anjuran untuk tetap dirumah menjadi dilematis ditengah semakin banyaknya

pekerja yang di PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) akibat Covid-19. Anjuran *stay at home* tanpa insentif pada penduduk ekonomi lemah memunculkan masalah di kemudian hari.

Gambaran latar belakang tersebut, mendasari keinginan peneliti menganalisis kebijakan pada sektor sosial-ekonomi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka penanganan dampak wabah COVID-19 di Indonesia dari persepektif studi keamanan nasional. Hal ini dalam rangka memberikan evaluasi serta tawaran kebijakan untuk Pemerintah Provinsi DIY sebagai bentuk kontribusi dalam upaya melawan ganasnya pandemi COVID-19 yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat DIY yang implikasinya berpengaruh pada terjadinya konflik dan keamanan nasional.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif dipilih karena peneliti ingin menganalisis secara komprehensif, kebijakan pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penanganan dampak wabah COVID-19 pada sektor sosial dan

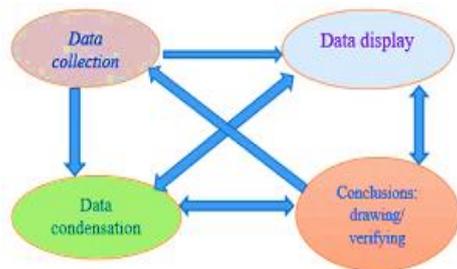
ekonomi, dari perspektif studi keamanan nasional.

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer yang terdiri atas subjek penelitian dan objek penelitian, serta data sekunder yang terdiri atas berbagai dokumen tertulis yang berkaitan dengan topik penelitian. Sedangkan model evaluasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah CIPP Evaluation model (*Context, Input, Process, Product*) karena obyek penelitian tidak hanya pada hasil semata tetapi juga melihat semua aspek yang ada baik itu konteks, input, proses, maupun produk atau hasilnya.

Dalam bagian subjek penelitian, terdapat dua kategori narasumber yaitu Aparat Pemerintahan dan Akademisi/LSM. Adapun teknik yang digunakan dalam pemilihan narasumber adalah teknik pengambilan sampel bertujuan (*purposive random sampling*), yaitu mereka yang diasumsikan mempunyai informasi yang dibutuhkan. Selain itu, target wawancara juga dapat dikembangkan melalui teknik bola salju (*snowballing*).

Data yang sudah terkumpul, maka data analisis menggunakan Analisis Data Interaktif (Rider et al., 2014) yang meliputi kondensasi data, penyajian data,

penarikan, dan verifikasi kesimpulan seperti dalam Gambar 1.



Gambar 1. Model Analisis Interaktif Milles dan Huberman

Sumber : Rider et al, 2014

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Kondisi pandemi COVID-19 yang melanda secara luas di Indonesia saat ini, jika tidak diatasi dan diantisipasi dengan seksama tentu akan menimbulkan permasalahan tidak hanya di sektor kesehatan namun juga ekonomi dan sosial yang akan berdampak mengancam keamanan nasional. Guncangan ketahanan masyarakat di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta karena adanya pandemi COVID-19 ini bervariasi mulai dari sektor kesehatan juga sektor ekonomi seperti banyak pekerja yang terkena PHK, UMKM, jasa angkutan umum / ojek, dan pedagang yang terdampak.

Upaya Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menangani dampak wabah COVID-19 terhadap sosial-ekonomi masyarakat adalah dengan langkah konkrit seperti memberikan bantuan kepada sebagian masyarakat

terdampak, yang ekonominya di bawah rata-rata. Dengan begitu, masyarakat dari semua lapisan diharapkan dapat bertahan hidup. Bantuan sosial tersebut juga diharapkan menjadi stimulus untuk kelangsungan hidup kedepannya dimana masyarakat diharapkan tidak berputus asa dalam menjalani kehidupan. Selain itu, diterapkan pula metode *win win solution* dimana kegiatan perekonomian yang berbasis pada pariwisata dan pendidikan tetap dibuka, namun dengan batasan tertentu dan kewajiban mematuhi protokol kesehatan. Hal itu adalah langkah terbaik yang dapat diupayakan supaya perekonomian di Yogyakarta tidak lantasi mati total. Upaya tersebut cukup efektif meski belum sepenuhnya optimal.

Strategi selanjutnya yang direncanakan oleh Pemerintah DIY untuk diupayakan guna meningkatkan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang terdampak negatif akibat pandemi COVID-19 adalah dengan merumuskan suatu kebijakan tentang menjalankan gerak perekonomian dan sosial berbasis pada teknologi. Hal ini merupakan langkah yang mengakomodir kebutuhan sosial-ekonomi, namun tetap aman bila dilihat dari segi kesehatan dimana kontak secara langsung tidak terjadi. Sebagai

contoh, penjualan produk oleh-oleh, souvenir, produk UMKM khas Yogyakarta dan sekitar melalui sistem online yang aman, terdaftar, dan diawasi. Namun terlebih dulu masalah perizinan perlu untuk diselesaikan dan disosialisasikan, agar nantinya calon pembeli menjadi lebih yakin atas barang yang dijual. Sebab tingkat kepercayaan orang akan membeli *online* dengan melihat barang secara langsung tentunya menjadi berbeda. Dalam giat pertemuan dan kegiatan sosial juga sebaiknya dilaksanakan dengan basis teknologi dimana kontak fisik secara langsung minim terjadi sehingga meminimalisir penyebaran virus corona yang berbahaya.

Walaupun demikian, diakui juga bahwa konkretisasi dari kebijakan perekonomian berbasis digital yang dicanangkan tersebut masih memiliki beberapa kelemahan. Hal ini dapat dimengerti karena tidak semua masyarakat memahami dunia digital. Apalagi kebijakan tersebut lebih ditekankan pada UMKM, yang tentunya melibatkan masyarakat menengah ke bawah. Selain itu, fasilitas masyarakat bersangkutan juga belum tentu dapat mendukung kebijakan yang telah diambil. Tidak semua pelaku UMKM memiliki sarana-prasarana yang memungkinkan

mereka untuk dapat bersaing dalam perdagangan digital. Di sini, dapat terjadi bahwa maksud baik dari strategi pemerintah DIY untuk membantu masyarakat kecil malah akhirnya terjebak pada situasi yang sama, yaitu yang kuat dalam permodalanlah yang dapat memenangkan persaingan perdagangan digital. Lagi-lagi masyarakat menengah ke bawah akan kalah, dan dengan demikian potensi konflik tetap terjadi.

Abraham Maslow, salah seorang pemikir yang dilahirkan pada tahun 1908 dalam keluarga imigran Rusia-Yahudi di Brooklyn, New York berpendapat terdapat 5 macam kebutuhan dasar, yang senantiasa dialami seseorang individu yakni kebutuhan fisiologis, rasa aman, kasih sayang, penghargaan, aktualisasi diri.



Gambar 2. Segitiga Maslow
 Sumber : Maslow, Abraham H, 1984

Pemenuhan kebutuhan seperti makanan, minuman, pakaian, tempat berteduh, tidur dan oksigen (sandang, pangan, papan) masuk ke dalam

kebutuhan fisiologis. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan yang paling dasar (Maslow, 1984). Kebutuhan fisiologis adalah kebutuhan yang paling kuat dan mendesak yang harus dipenuhi paling utama oleh manusia dalam menjalankan kehidupan kesehariannya. Ini berarti bahwa pada diri manusia yang sangat merasa kekurangan segala-galanya dalam kehidupannya, besar sekali kemungkinan bahwa motivasi yang paling besar ialah kebutuhan fisiologis dan bukan yang lain-lainnya.

Sedangkan menurut Frank G. Goble, sesuatu itu disebut sebagai kebutuhan dasar apabila memenuhi beberapa syarat berikut yaitu:

1. Bila tidak terpenuhi dapat menimbulkan penyakit,
2. Memenuhinya dapat mencegah timbulnya penyakit,
3. Pemulihannya dapat menyembuhkan penyakit,
4. Dalam situasi-situasi tertentu yang sangat kompleks, orang bebas memilih (seseorang yang sedang kekurangan, akan cenderung memilih kebutuhan dibanding kepuasan lainnya),
5. Kebutuhan itu tidak aktif, lemah atau secara fungsional tidak terdapat pada orang yang sehat (Goble, 1971).

Pada kasus dimana karantina kesehatan atau pengetatan protokol kesehatan seperti *social distancing* atau pembatasan jam aktivitas, himbauan untuk tetap dirumah, bertabrakan dengan fakta bahwa masyarakat perlu untuk bertemu dalam menjalankan kegiatan sosial dan perekonomian. Hal ini berdampak pada kesulitan sebagian masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan fisiologisnya. Mengacu pada yang dijelaskan oleh teori Maslow, maka hal ini dapat menimbulkan konflik bila tidak segera ditangani secara bijak.

Di sisi lain, pandemi COVID-19 juga mengancam manusia sehingga masuk pada tingkat kedua dari kebutuhan yakni kebutuhan akan rasa aman. Kebutuhan akan keamanan merefleksi keinginan untuk mengamankan imbalan-imbalan yang telah dicapai dan untuk melindungi diri sendiri terhadap bahaya,cedera, ancaman, kecelakaan, kerugian atau kehilangan. Ketakutan akan keganasan virus corona menimbulkan rasa tidak aman dalam kehidupan sehari-hari.

Bahkan, ketakutan tersebut sampai menimbulkan gejala dalam kebersamaan akibat rasa tidak aman tersebut. Masing-masing orang berusaha melindungi diri dari keterjangkitan virus corona sampai melahirkan rasa tidak

aman dengan orang lain. Manusia saling takut terhadap sesamanya bahkan bisa sampai saling curiga. Akibat lanjutnya adalah orang enggan untuk bertemu. Padahal, aktivitas perekonomian (pasar) menuntut adanya perjumpaan. Produsen, distributor dan konsumen mempunyai jalinan yang tak terpisahkan. Sebab hanya dengan jalinan hubungan tersebutlah kepercayaan dapat lahir. Di sinilah letak salah satu hambatan dari kebijakan ekonomi digital yang dicanangkan pemerintah DIY.

Berdasarkan analisis, peneliti mendapat fakta bahwa, sinergitas antara kebutuhan akan rasa aman dari sisi kesehatan dan sisi perekonomian harus berjalan bersamaan. Yang perlu dipahami disini adalah, berdasar teori Maslow, kebutuhan di tingkat pertama seperti sandang, pangan, papan, lebih dasar dibandingkan kebutuhan mengenai rasa aman. Berarti dalam hal ini, bila telah mencapai puncaknya, masyarakat tidak tercukupi kebutuhan paling dasarnya, permasalahan virus corona akan menjadi sesuatu yang diabaikan karena ia masuk pada kebutuhan tingkat kedua. Semua manusia termasuk masyarakat Yogyakarta pastinya ingin memenuhi semua kebutuhan, baik itu kebutuhan, sandang, pangan, papan, maupun

kebutuhan akan rasa aman. Akan tetapi, ketika masyarakat dihadapkan pada pilihan atas kebutuhan-kebutuhan tersebut maka mereka pasti akan memilih kebutuhan pokok, yaitu pemenuhan sandang, pangan dan papan. Masyarakat dapat mengabaikan kebutuhan akan rasa aman (soal kesehatan – COVID-19) demi “*sesuap nasi*”. Hal ini sejalan dengan teori pemenuhan kebutuhan Maslow.

Hanya saja disini, yang perlu menjadi catatan adalah bahwa gerak pemerintah haruslah dilakukan secara cepat dan sosialisasi kepada masyarakat harus lebih digalakan. Mengenai kemungkinan terburuk dimana mungkin saja terjadi kegagalan dalam kerja-kerja dan terjadi konflik, maka setidaknya perlu disiapkan cadangan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terlebih dahulu.

Satu strategi yang menurut peneliti sangat penting adalah komunikasi non formal, seperti semisal dengan cara “*silaturahmi*” atau mekanisme “*blusukan*” yang dulu pernah dilakukan Presiden Jokowi. Pemerintah harus memperkuat strategi tersebut karena dengan komunikasi segala masalah akan dapat terselesaikan, termasuk masalah sosial-ekonomi sebagai dampak COVID-19. Komunikasi tersebut dapat dilakukan

dengan berbagai cara, misalnya melalui bantuan barang dan makanan, melalui website tanggap COVID-19, kunjungan ke pasien COVID-19 dan keluarganya, menyapa pada pekerja yang terdampak COVID-19, serta banyak hal lainnya. Semuanya itu telah dilakukan oleh Pemerintah DIY. Melalui komunikasi non formal ini juga, pemerintah dapat melakukan sosialisasi secara lebih mendalam kepada masyarakat. Bukan yang bersifat formal yang menyebabkan masyarakat kurang tertarik, namun melalui pendekatan yang lebih terasa dekat kepada masyarakat sehingga memungkinkan masyarakat untuk memahami apa yang disampaikan dan hendak dilaksanakan pemerintah sehingga program-program akan berjalan lebih mudah. Tinggal sekarang, pemerintah memberikan penekanan pada nilai pendekatan tersebut dalam semua kegiatan dan pelaksanaan dari kebijakan-kebijakan mereka.

Dengan mekanisme komunikasi non formal yang mendalam, masyarakat dapat memahami situasi yang sedang dihadapi, termasuk memahami kesulitan pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19 ini beserta dampaknya. Komunikasi yang baik juga dapat menguatkan masyarakat untuk berjuang

bersama pemerintah dalam menghadapinya. Walaupun masyarakat kesulitan ekonomi, dan dengan demikian pemenuhan kebutuhan pokoknya menjadi tertunda (teori kebutuhan Maslow), akan tetapi konflik dapat saja tidak terjadi karena masyarakat telah disapa oleh pemerintah melalui strategi komunikasi non formal dan masyarakat sudah merasa didengar. Komunikasi non formal yang langsung berhadapan dengan masyarakat juga memungkinkan pemerintah untuk lebih mendalami dan memahami apa yang sebenarnya dikeluhkan oleh masyarakat, apa yang menjadi permasalahan mereka, juga apa yang sesungguhnya dibutuhkan oleh masyarakat.

Selain itu yang juga yang menjadi catatan adalah perlunya koordinasi dengan pemerintah daerah di kota-kota atau wilayah yang berbatasan dengan DIY seperti misal Klaten, Magelang, terkait jalur keluar masuk pendatang/wisatawan. Penyebab utama penularan adalah interaksi dengan orang yang berpotensi/terjangkit COVID-19 dan jalur-jalur keluar masuk pendatang ini sangat rawan untuk menjadi pintu penyebaran. Perlu adanya kerjasama yang baik antar pemerintah daerah untuk kemudian mengatur bagaimana mekanisme yang

tepat untuk menghalau virus yang datang melalui pendatang. Perlu diperketat lagi aturan keluar masuk pendatang seperti keterangan bebas COVID, kepentingan pendatang tersebut untuk masuk ke wilayah DIY, dsb. Karena akan menjadi sia-sia apabila masyarakat telah sepenuhnya bekerja sama dalam menghalau COVID-19 namun penyebaran masih berpotensi besar terjadi melalui kedatangan para wisatawan atau pendatang yang ternyata terjangkit. Oleh karena itu, maka hal tersebut harus dicegah melalui penegakan hukum yang ada/regulasi yang terlebih dahulu diawali dengan koordinasi yang dapat menghasilkan aturan yang mengatur hal tersebut semisal menghasilkan SK Gubernur.

Sebagai upaya terpenting, penegakan hukum kepada masyarakat perlu menjadi hal yang sangat ditingkatkan. Hal ini dalam rangka mengoptimalkan penanganan COVID-19 yang berjalan sinergi dengan peningkatan sosial-ekonomi masyarakat di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Aturan-aturan yang dibuat harus matang dan bijaksana, diawali dengan agenda komunikasi sehingga aturan yang ada merangkum aspirasi masyarakat. Dan juga koordinasi dengan wilayah lain yang

menghasilkan sebuah kebijakan. Namun tanpa penegakan hukum, dan apabila aturan tidak dilaksanakan secara tegas, maka akan menjadi tidak bermanfaat. Maka penegakan aturan menjadi opsi sekaligus solusi dalam mencapai titik keberhasilan peningkatan sosial-ekonomi di tengah pandemi COVID-19.

Kesimpulan Rekomendasi

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu provinsi yang paling rentan terdampak adanya pandemi COVID-19. Sebab, tak hanya masalah kesehatan, sebagian besar perekonomian masyarakat di Yogyakarta ditunjang dari sektor informal pariwisata dan pendidikan. Adanya pandemi COVID-19 menyebabkan perekonomian para pelaku usaha kecil yang kerjanya bergantung pada pariwisata dan pendidikan menjadi terganggu atau bahkan kehilangan mata pencaharian. Upaya Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menangani dampak wabah COVID-19 terhadap sosial-ekonomi masyarakat adalah dengan langkah konkrit seperti memberikan bantuan kepada sebagian masyarakat terdampak, yang ekonominya di bawah rata-rata. Dengan begitu, masyarakat dari semua lapisan diharapkan dapat bertahan

hidup. Bantuan sosial tersebut juga diharapkan menjadi stimulus untuk kelangsungan hidup kedepannya dimana masyarakat diharapkan tidak berputus asa dalam menjalani kehidupan. Selain itu, diterapkan pula metode win win solution dimana kegiatan perekonomian yang berbasis pada pariwisata dan pendidikan tetap dibuka, namun dengan batasan tertentu dan kewajiban mematuhi protokol kesehatan. Hal itu adalah langkah terbaik yang dapat diupayakan supaya perekonomian di Yogyakarta tidak lantas mati total. Upaya tersebut cukup efektif meski belum sepenuhnya optimal.

Strategi selanjutnya yang dapat diupayakan untuk meningkatkan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang terdampak negatif akibat pandemi COVID-19 adalah dengan merumuskan suatu kebijakan tentang menjalankan gerak perekonomian dan sosial berbasis pada teknologi. Hal ini merupakan langkah yang mengakomodir kebutuhan sosial-ekonomi, namun tetap aman bila dilihat dari segi kesehatan dimana kontak secara langsung tidak terjadi. Sebagai contoh, penjualan produk oleh-oleh, souvenir, produk UMKM khas Yogyakarta dan sekitar melalui sistem online yang aman, terdaftar, dan diawasi. Namun

terlebih dulu masalah perizinan perlu untuk diselesaikan dan disosialisasikan, agar nantinya calon pembeli menjadi lebih yakin atas barang yang dijual. Sebab tingkat kepercayaan orang akan membeli online dengan melihat barang secara langsung tentunya menjadi berbeda. Dalam giat pertemuan dan kegiatan sosial juga sebaiknya dilaksanakan dengan basis teknologi dimana kontak fisik secara langsung minim terjadi sehingga meminimalisir penyebaran virus corona yang berbahaya.

Terkait rekomendasi, bagi Pemerintah Pusat, komunikasi dan koordinasi dengan daerah secara lebih mendalam sangat diperlukan agar tidak terjadi benturan aturan. Penyederhanaan mekanisme alur dalam menjalankan program juga dibutuhkan agar dapat mempermudah bagi pemerintah daerah untuk segera menjalankan program-program kepada masyarakat tanpa terhalang mekanisme regulasi yang menyulitkan, terlebih di masa pandemi seperti ini dimana lebih banyak hal urgent yang harus ditangani.

Bagi Pemerintah Provinsi DIY, diperlukan komunikasi non formal sebagai salah satu strategi dalam memasifkan sosialisasi program pemerintah. Melalui komunikasi non

formal, pemerintah dapat melakukan sosialisasi secara lebih mendalam kepada masyarakat dibandingkan dengan komunikasi yang bersifat formal. Pendekatan komunikasi non formal akan lebih terasa dekat kepada masyarakat sehingga memungkinkan masyarakat untuk memahami apa yang disampaikan dan hendak dilaksanakan pemerintah sehingga program-program akan berjalan lebih mudah. Selain itu yang juga yang menjadi catatan adalah perlunya koordinasi dengan pemerintah daerah di kota-kota atau wilayah yang berbatasan dengan DIY, terkait jalur keluar masuk pendatang/wisatawan. Setelah adanya komunikasi dan koordinasi tersebut, bisa kemudian hasilnya diwujudkan dan dituangkan dalam sebuah aturan yang wajib dipatuhi semisal berupa SK Gubernur dan sebagainya. Kemudian penegakan hukum dan aturan yang tegas supaya masyarakat mematuhi hukum yang berlaku setelah adanya himbauan. Perlu ada penegakan yang bersifat represif bila masyarakat tidak taat pada aturan dan pemerintah perlu memastikan bahwa penegakan aturan ini dapat berjalan.

Rekomendasi lainnya adalah bagi para akademisi, perlu dilanjutkan penelitian studi evaluasi atas kebijakan

dan upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menangani pandemic COVID-19 beserta dampaknya pada kehidupan sosial-ekonomi masyarakat. Hal ini selanjutnya juga dapat menjadi pembelajaran kedepannya, bagi pemerintah DIY sendiri, pemerintah pusat, maupun daerah lain.

Daftar Pustaka

- Goble, Frank G. (1971). *Madzhab Ketiga Psikologi Humanistik Abraham Maslow*, terj. Drs. A. Supratinya. Yogyakarta: PT Kanisius.
- Kemhan. (2014). *Buku Putih Pertahanan*. Jakarta: Kemhan
- Maslow, Abraham H. (1984). *Motivasi dan Kepribadian: Teori Motivasi dengan Ancangan Hirarki Kebutuhan Manusia (judul asli: Motivation and Personality)*. Diterjemahkan oleh Nurul Iman. Jakarta: PT. Pustaka Binaman Pressindo.
- Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, Johnny Saldana. (2014). *Qualitative Data Analysis : A Methods Sourcebook Edition 3*. London : SAGE Publications.